



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 117 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. bahwa pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 .

KEDUA : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah, meliputi :

1. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Tenaga Lainnya;
2. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :

1. mengumpulkan dan menata usahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan kode Rekening 6.01.02.2.02.0
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep.117/2024
TANGGAL :

SUSUNAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.

B. SEKRETARIAT MAJELIS

- I. KETUA : SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 4. KASUBBAG UMUM DAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
 - 5. KOORDINATOR PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
 - 6. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF